



**PUTUSAN**

Nomor 2648 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. LUVIN INDONUSA**, berkedudukan di Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Bogor, diwakili oleh Anton Bambang Soegiarto, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Haris Tuasikal, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum HRP Law Firm, berkantor di Jalan G I (Tali Raya) Nomor 8A, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2017; Pemohon Kasasi;

*L a w a n*

**PT. BANK VICTORIA INTERNASIONAL, Tbk.**, berkedudukan di Panin Tower Lantai 15, 20, 25, Senayan City, Jalan Asia Afrika Lot 19, Jakarta Pusat, diwakili oleh Ahmad Fajar dan Rusli selaku Direksi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Isdawati A. Prihadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Isdawati, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Raya Kelapa Kopyor CE II Nomor 9, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2019; Termohon Kasasi;

*D a n*

**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR**, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 45 Tanah Garam, Panaragan, Bogor Tengah, Kota Bogor; Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2648 K/Pdt/2020*



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merestrukturisasi kredit dengan memberikan tambahan modal kerja kepada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa nilai limit untuk lelang barang jaminan milik Penggugat adalah terlalu rendah tidak sesuai dengan harga pasar;
5. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk menghentikan proses lelang atas barang jaminan milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara-perkara yang timbul;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Surat kuasa Penggugat tidak khusus;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum lebellum*);
3. Gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 194/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 16 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- A. Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- B. Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 765/PDT/2018/PT.DKI tanggal 8 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 100/Srt.Pdt.Kas/2019/PN.JKT.PST. Nomor 194/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 765/Pdt/2018/PT.DKI tanggal 8 Maret 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 194/PDT.G/2017/PN.JKT.PST tanggal 16 Mei 2018;

dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2648 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi dahulu terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merestrukturisasi kredit dengan memberikan tambahan modal kerja kepada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa nilai limit untuk lelang barang jaminan milik Penggugat adalah terlalu rendah tidak sesuai dengan harga pasar;
5. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang untuk menghentikan proses lelang atas barang jaminan milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara-perkara yang timbul;

Atau, jika Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan menilai alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat, *Judex Facti* telah mendasarkan pada hukum pembuktian dan konsep perbuatan melawan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2648 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karena itu kesimpulan dan putusan *Judex Facti* bahwa dalil pokok Penggugat tidak dapat dibuktikan sudah sesuai dengan hukum dan didukung oleh pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. LUVIN INDONUSA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. LUVIN INDONUSA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2648 K/Pdt/2020